



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I KETUT CATUR MULIAWAN
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 710214

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.738.166.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 675.000.000
2. Tanah Seluas 244 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 823.500.000
3. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 810.225.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 368 m2/74 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, LAINNYA Rp. 229.362.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 363 m2/12 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, LAINNYA Rp. 200.079.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 169.100.000

1. MOTOR, BENELLI SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 35.500.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 15.600.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2017, HIBAH
TANPA AKTA Rp. 13.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU AYL A Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 137.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.388.891



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.047.154.891
III. HUTANG	Rp.	494.590.522
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.552.564.369

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I KETUT CATUR MULIAWAN
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 710214

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.738.166.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 675.000.000
2. Tanah Seluas 244 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 823.500.000
3. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 810.225.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 368 m2/74 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, LAINNYA Rp. 229.362.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 363 m2/12 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, LAINNYA Rp. 200.079.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 51.100.000

1. MOTOR, BENELLI SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 35.500.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 15.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 154.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 190.974

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.943.956.974

III. HUTANG Rp. 463.652.809

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.480.304.165



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN GEDE YASA
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 488592

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	76.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.029.860
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	680.029.860

III. HUTANG Rp. 275.907.865

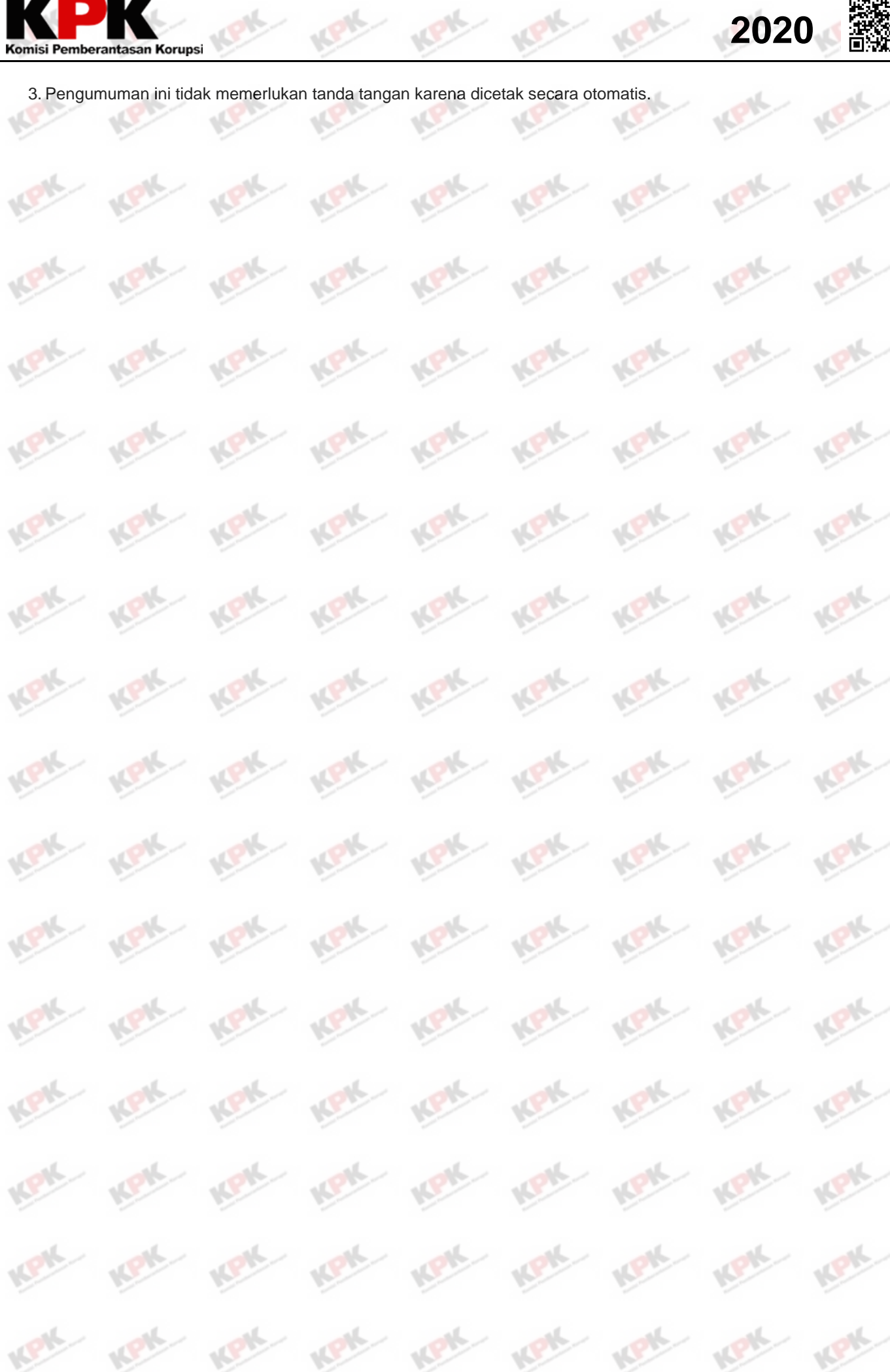
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 404.121.995

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI

UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN GEDE YASA
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 488592

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 65.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 61.537

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 665.061.537

III. HUTANG Rp. 248.337.711

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 416.723.826

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

